



Strategi Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Akses Konsumsi Pangan Rumah Tangga Miskin di Kota Banda Aceh

Nafa Khunaiya Zuhra^{1*}, Winny Dian Safitri², Ibnu Hajar³

^{1, 2, 3} Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Indonesia

Email: 220604042@student.ar-raniry.ac.id^{1*}, winny.diansafitri@ar-raniry.ac.id², ibnu.hajar@ar-raniry.ac.id³

Abstract

Poverty and food insecurity remain significant challenges affecting the ability of low-income households to meet their food needs sustainably. The Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) represents a government policy instrument designed to improve food access and reduce household food expenditure; however, the transition from the e-Warong mechanism to direct transfers into beneficiaries' accounts has created consequences for flexibility, monitoring, and the utilization of assistance. This research examines the distribution strategy of BPNT in fulfilling food consumption needs in Banda Aceh City through a qualitative approach and case study design. Data were collected through semi-structured in-depth interviews, observation, and documentation analysis involving 25 informants, including representatives of the Social Affairs Office, social facilitators, and Beneficiary Families (KPM), with data credibility strengthened through methodological triangulation. The findings indicate that direct transfers through KPM accounts facilitate access, distribution efficiency, and beneficiaries' flexibility in selecting food according to household needs. Nevertheless, the new mechanism reduces direct monitoring of how assistance is utilized, while irregular disbursement, limited communication of disbursement information, and insufficient assistance amounts remain major challenges. The findings highlight a trade-off between beneficiary flexibility and government control, indicating the need to strengthen communication, monitoring, and adjustment of assistance values to improve the effectiveness of BPNT in supporting sustainable household food consumption.

Keywords

BPNT, Food Security, Meeting Consumption Needs

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi faktor utama yang memicu kerawanan pangan, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan sangat diperlukan guna memperluas keterjangkauan dan akses masyarakat terhadap pangan (Suntty et al., 2025). Salah satu fokus utama pembangunan berkelanjutan Indonesia pada tahun 2022 adalah isu-isu terkait keamanan pangan nasional dan kemiskinan. Meskipun tingkat kemiskinan nasional turun ke level di bawah era pra-Covid, kinerja keamanan pangan bervariasi secara regional (Jakaria et al., 2024). Ketahanan pangan dan kemiskinan memiliki hubungan yang bersifat timbal balik dan tidak terpisahkan. Kerentanan kondisi ketahanan pangan dapat menjadi penyebab kemiskinan. Sementara di sisi lain, kondisi kemiskinan itu sendiri menyebabkan ketidakmampuan untuk mencapai ketahanan pangan (Mulyasari et al., 2024). Serta harga yang tinggi dan kekurangan pangan dapat memperburuk masalah kerawanan pangan di kalangan masyarakat miskin (Dula et al., 2024).

Ketahanan rumah tangga merujuk pada kepastian akan cukupnya pangan dalam satu keluarga (Mustofa et al., 2023). Kekurangan energi dan minimnya perbedaan konsumsi protein di berbagai daerah menunjukkan kebutuhan akan kebijakan yang lebih fokus pada tingkat rumah tangga guna meningkatkan ketahanan pangan masyarakat (Harun et al., 2025). Dalam hal ini, kecukupan konsumsi pangan, baik dari segi jumlah maupun pemenuhan standar gizi, menjadi faktor penting dalam mendukung terciptanya ketahanan pangan rumah tangga (Oktalia et al., 2025). Kondisi ini dapat berdampak pada kualitas gizi, kesehatan dan kemampuan masyarakat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Intervensi kebijakan yang terarah diperlukan agar rumah tangga miskin memperoleh akses pangan yang cukup.

Program bantuan sosial pangan merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk menjamin ketahanan masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu program bantuan sosial pangan yang diberlakukan oleh pemerintah adalah Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). BPNT dirancang untuk menyempurnakan

mekanisme penyaluran bantuan pangan dengan prinsip distribusi 6T (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi) (Olabu et al., 2024). Program ini memperluas variasi komoditas yang dapat dibeli, yang sebelumnya terbatas pada beras dan telur, kini mencakup lauk-pauk dan sayuran. Ini merupakan langkah dari pemerintah dalam menyediakan akses kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap bahan pokok yang mengandung gizi tambahan (Ernawati et al., 2024). Penelitian Ridha & Rumayya (2024) menunjukkan bahwa keluarga yang hidup dalam kemiskinan di wilayah yang rentan terhadap kekurangan pangan merupakan kelompok yang paling memerlukan dukungan bantuan pangan, meskipun dampaknya dari program tersebut masih berbeda-beda di setiap wilayah. Selain itu, kenaikan dan fluktuasi harga pangan juga berdampak langsung terhadap ketahanan pangan rumah tangga miskin, terutama dalam pemenuhan konsumsi pangan sehari-hari (Amolegbe et al., 2021).

Program BPNT ditujukan guna meminimalkan beban pengeluaran rumah tangga keluarga miskin dan meningkatkan akses terhadap makanan pokok bergizi (Munthe & Manggalou, 2025). Program ini berjalan seiring dengan kebijakan stabilisasi pangan, seperti distribusi beras melalui Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) pada tahun 2024 yang bertujuan menjaga ketersediaan dan harga pangan (Ibrahim et al., 2024). Melalui tujuan ini, diharapkan program ini mampu mendukung upaya perluasan akses masyarakat terhadap makanan bergizi serta mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan (Pertiwi et al., 2019). Pada akhirnya, implementasi BPNT diarahkan untuk secara substansial mengurangi angka kemiskinan nasional sekaligus meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat kurang mampu (Laurentcia & Yusran, 2021). Hasil penelitian oleh Munthe & Manggalou (2025) menunjukkan bahwa program tersebut cukup mempermudah meringankan pengeluaran pangan bagi rumah tangga miskin, meskipun terdapat tantangan terkait ketepatan penerima manfaat dan keterbatasan sumber daya pihak pelaksana. Akan tetapi, penelitian tersebut belum secara menyeluruh menghubungkan penyaluran BPNT dengan status kemiskinan dan ketahanan pangan di suatu wilayah. Rahman et al. (2024) mengungkapkan

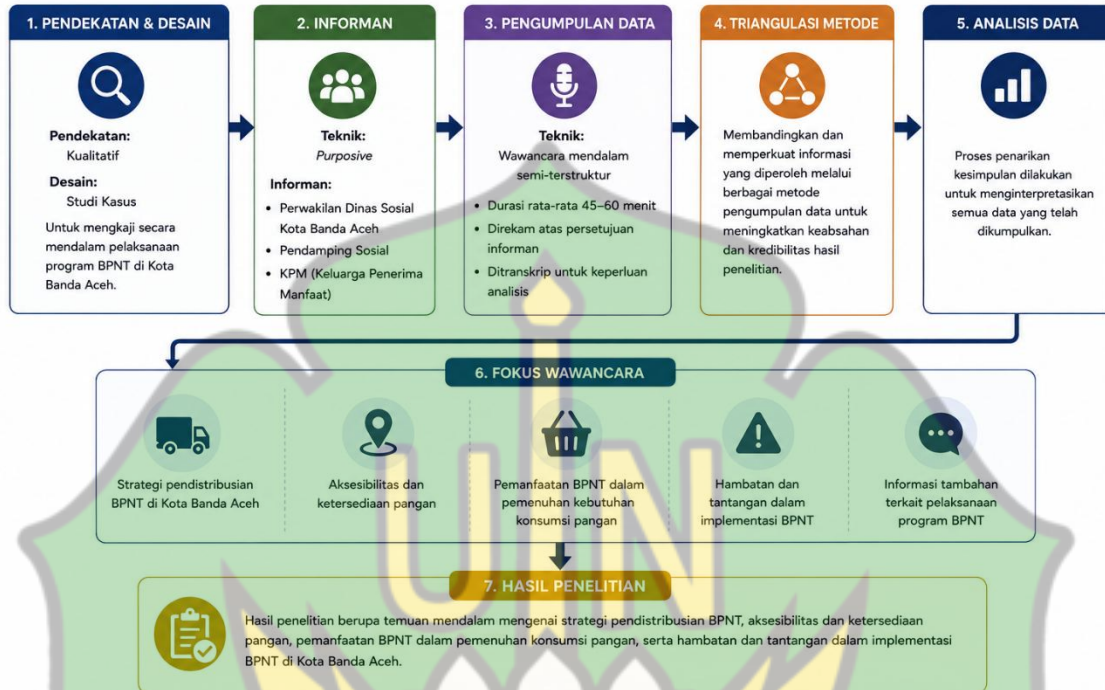
bahwasanya BPNT efektif menjangkau rumah tangga rentan, terutama keluarga dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang rendah, jumlah anggota keluarga yang besar, dan pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Namun, di sisi lain, hasil penelitian Puspitasari et al. (2025) menunjukkan bahwa BPNT cukup efektif dalam menjangkau keluarga miskin secara tepat sasaran serta berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan pangan dan pengurangan beban ekonomi penerima manfaat melalui mekanisme non-tunai menggunakan KKS. Kendati demikian, dalam praktiknya, program masih menemui sejumlah kendala, khususnya terkait aksesibilitas bagi lansia, kualitas bahan pangan, dan keterbatasan sosialisasi. Secara umum, BPNT dinilai cukup adil dan sesuai regulasi, namun memerlukan penguatan pendataan, pengawasan, dan evaluasi agar efektivitasnya dapat ditingkatkan. Berdasarkan penelitian terkait, diketahui bahwasanya Program BPNT secara umum berkontribusi dalam meringankan beban ekonomi dan memperbaiki akses pangan rumah tangga miskin. Namun, akses terhadap pangan yang diterima oleh rumah tangga miskin masih menghadapi berbagai kendala.

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya dapat dilihat dari tersalurkannya bantuan kepada penerima yang ditetapkan, tetapi juga dari sejauh mana bantuan tersebut dapat diberikan kemudahan bagi rumah tangga miskin dalam memperoleh dan mengakses pangan yang dibutuhkan. Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, terutama karena pelaksanaan pendistribusian BPNT dan perannya dalam meningkatkan akses konsumsi pangan rumah tangga miskin diperlukan untuk memahami kondisi yang terjadi di lapangan secara lebih mendalam, termasuk berbagai kemudahan maupun hambatan yang dirasakan penerima manfaat dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pendistribusian BPNT serta menjadi masukan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan program agar bantuan yang diberikan tidak hanya tersalurkan dengan baik, tetapi juga mampu meningkatkan akses rumah tangga miskin terhadap pangan yang dibutuhkan.

METODE PENELITIAN

Gambar 1. Alur Kerja Penelitian



Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus guna mengkaji secara mendalam pelaksanaan program BPNT di Kota Banda Aceh. Penggunaan metode kualitatif ditujukan untuk memahami secara mendalam strategi pendistribusian BPNT dalam meningkatkan akses konsumsi pangan rumah tangga miskin di Kota Banda Aceh berdasarkan kondisi dan pengalaman nyata para informan terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan mengikuti Munthe & Manggalou (2025) dan Puspitasari et al. (2025), yaitu wawancara secara mendalam semi-terstruktur dengan durasi rata-rata 45-60 menit dan direkam atas persetujuan informan serta ditranskrip untuk keperluan analisis. Informan ditentukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program. Penelitian ini melibatkan 25 orang informan. Informan utama dalam penelitian ini adalah 15 orang KPM yang merasakan langsung program bantuan tersebut. Untuk memperkuat data, penelitian ini juga melibatkan 9 orang pendamping sosial sebagai informan kunci yang mengawasi penyaluran bantuan, serta 1 orang perwakilan Dinas Sosial sebagai informan pendukung dari pihak

birokrasi. Kriteria informan yakni memiliki keterlibatan aktif pada program BPNT dan berdomisili tetap di Kota Banda Aceh. Lokasi penelitian dilaksanakan di 9 kecamatan yang berada di Kota Banda Aceh yang dipilih berdasarkan pertimbangan relevansi terhadap fokus penelitian.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menerapkan triangulasi metode untuk membandingkan dan memperkuat informasi yang didapatkan melalui berbagai metode pengumpulan data, sehingga dapat meningkatkan keabsahan serta kredibilitas hasil yang diperoleh. Selanjutnya, proses penarikan kesimpulan dilakukan untuk menginterpretasikan semua data yang telah dikumpulkan. Wawancara dirancang untuk menggali informasi mengenai strategi pendistribusian BPNT, aksesibilitas dan ketersediaan pangan, pemanfaatan BPNT dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan, serta hambatan dan tantangan dalam implementasi BPNT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Bagian ini merupakan hasil wawancara lapangan pada saat melakukan penelitian di Kota Banda Aceh dengan melibatkan pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian, yaitu perwakilan Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pendamping sosial serta KPM. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sejak tahun 2023, pendistribusian BPNT di Kota Banda Aceh beralih dari mekanisme e-Warong menjadi mekanisme penyaluran langsung dari pemerintah pusat ke rekening KPM. Bantuan dilakukan melalui KKS sebagai sarana untuk mencairkan dana di ATM, sementara yang belum mendapatkan KKS dapat mengambilnya di kantor pos. Dinas Sosial berperan sebagai koordinator yang menerima data dari pusat dan menyampaikan informasi kepada pendamping sosial. Pendamping sosial akan menginformasikan kepada KPM terkait penyaluran bantuan dan membantu KPM jika terdapat kendala terkait bantuan.

Mekanisme tersebut menunjukkan adanya pembagian peran antara pemerintah daerah, pendamping sosial dan penerima manfaat yang mendukung proses pelaksanaan program. Keberadaan pendamping sosial menjadi penting

karena tidak hanya berfungsi dalam menyampaikan informasi, tetapi juga membantu KPM ketika mengalami kendala dalam mengakses bantuan. Dengan demikian, efektivitas pendistribusian BPNT tidak hanya ditentukan oleh tersalurkannya bantuan kepada KPM, tetapi juga oleh sejauh mana mekanisme penyaluran dan pendampingan mampu mempermudah penerima dalam mengakses serta memanfaatkan bantuan untuk meningkatkan akses konsumsi pangan rumah tangga miskin.

Penetapan bantuan dilakukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan kriteria penerima berada pada desil 1 sampai dengan desil 5. Proses pengusulan melalui verifikasi ke lapangan dan hasil musyawarah desa sebelum diajukan ke pemerintah pusat. Selain itu, terdapat perubahan sistem penyaluran dari e-Warong menjadi transfer langsung ke rekening KPM. Pada sistem sebelumnya, bantuan disalurkan dalam bentuk bahan pangan yang seharusnya dibelanjakan di e-Warong, namun saat ini bantuan disalurkan langsung ke rekening KPM tanpa harus membelanjakannya di e-Warong. Aksesibilitas bantuan BPNT tergolong mudah karena KPM dapat menarik dana secara mandiri tanpa harus datang ke lokasi tertentu. Namun, dalam praktiknya, informasi penyaluran bantuan kerap tidak tersampaikan langsung, sehingga KPM harus memeriksa status dana bantuan mereka secara mandiri. Dari sisi akses pangan, sistem e-Warong sebelumnya membatasi jenis pangan tertentu yang telah disediakan. Setelah diganti menjadi transfer langsung ke rekening KPM, KPM mendapatkan kebebasan dalam membelanjakan kebutuhan pangan di tempat yang mereka inginkan. Ketersediaan pangan di Kota Banda Aceh cukup stabil, meskipun masih terdapat fluktuasi harga pada kondisi tertentu. Pada masa adanya e-Warong, harga, kualitas serta ketersediaan pangan masih dapat dipantau, sedangkan pada sistem saat ini tidak ada pemantauan langsung terkait kualitas dan harga yang dibeli oleh KPM.

Pemanfaatan BPNT digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan seperti beras, telur, minyak dan bahan pangan lainnya. KPM pada umumnya memahami bahwa BPNT digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Bantuan ini membantu meminimalkan beban pengeluaran rumah tangga, khususnya untuk pemenuhan konsumsi pangan pokok. KPM membeli beras sebagai kebutuhan utama

mereka dan membeli bahan pangan lain sebagai pelengkap. Namun, bantuan yang diterima belum sepenuhnya mencukupi dalam satu bulan jika tidak ada sumber pendapatan lain. Selain itu, setelah bantuan diberikan dalam bentuk uang, tidak ada pengawasan langsung terkait penggunaannya. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi. Pada aspek tepat waktu, distribusi BPNT belum sepenuhnya optimal karena penyaluran bantuan tidak selalu berlangsung secara teratur dan dalam beberapa kondisi dilakukan secara rapel. Kondisi tersebut juga diperkuat oleh belum optimalnya penyampaian informasi penyaluran kepada KPM. Pada sistem e-Warong sebelumnya, hambatan yang muncul antara lain antrean yang panjang, keterbatasan waktu pelayanan, serta keterbatasan jenis barang yang tersedia. Sementara pada sistem saat ini, hambatan yang muncul yaitu terkait tidak adanya pengawasan langsung terhadap penggunaan dana bantuan.

PEMBAHASAN

Temuan dari penelitian mengindikasikan bahwa sistem pendistribusian BPNT di Kota Banda Aceh telah mengalami transformasi yang cukup berarti, beralih dari sistem yang terkontrol menuju sistem yang lebih fleksibel. Peralihan dari mekanisme e-Warong menjadi penyaluran langsung melalui transfer ke rekening KPM memudahkan proses pendistribusian dan meningkatkan efisiensi dalam penyaluran bantuan kepada penerima. Strategi ini secara fundamental menyoroti kemudahan akses, distribusi yang efisien, dan fleksibilitas bagi penerima untuk memenuhi kebutuhan pangan di rumah. Melalui mekanisme ini, para KPM dapat mencairkan bantuan secara mandiri tanpa harus melalui e-Warong atau lokasi penyaluran tertentu, sementara pendamping sosial tetap berperan dalam penyampaian informasi dan penanganan kendala. Dengan demikian, metode distribusi yang diterapkan dapat dianggap berfokus pada peningkatan kemudahan akses dan kemandirian penerima dalam pengelolaan bantuan. Situasi ini didukung oleh penelitian Munthe & Manggalou (2025) yang menemukan bahwasanya transformasi sistem penyaluran BPNT dapat meningkatkan efektivitas distribusi dan memudahkan akses bagi penerima manfaat.

Jika ditinjau berdasarkan prinsip 6T, pelaksanaan distribusi BPNT di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa aspek tepat sasaran telah didukung melalui DTSEN, verifikasi lapangan, dan musyawarah desa. Tepat jumlah mengacu pada nominal bantuan yang telah ditetapkan, sedangkan tepat waktu masih menghadapi kendala karena penyaluran bantuan terkadang dilakukan secara rapel dan informasi pencairan belum selalu tersampaikan kepada KPM. Pada aspek tepat harga dan tepat kualitas, pengawasan menjadi lebih terbatas setelah perubahan dari e-Warong ke transfer langsung karena KPM memiliki kebebasan menentukan tempat dan jenis pangan yang dibeli. Sementara itu, tepat administrasi didukung melalui penggunaan data penerima yang terintegrasi dan proses pemutakhiran apabila ditemukan ketidaksesuaian data. Dengan demikian, penerapan prinsip 6T dalam distribusi BPNT telah berjalan, tetapi aspek ketepatan waktu, harga, dan kualitas masih memerlukan penguatan pengawasan dan komunikasi.

Selain itu, strategi distribusi yang berupa penyaluran langsung ke rekening KPM juga memberikan keleluasaan kepada KPM dalam memilih jenis makanan sesuai dengan kebutuhan konsumsi mereka. Kondisi tersebut didukung oleh A. Rahman et al. (2024) yang menerangkan bahwasanya BPNT memungkinkan penerima untuk memilih bahan pangan sesuai preferensi mereka, sehingga diharapkan mampu menunjang kebutuhan gizi keluarga mereka secara optimal. Karenanya, selain sebagai penyaluran bantuan, strategi distribusi juga berperan sebagai cara memberikan kesempatan bagi rumah tangga untuk menyesuaikan pola konsumsi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun, pendekatan yang menekankan pada aspek fleksibilitas ini juga membawa dampak berupa pengurangan kontrol terhadap penggunaan bantuan. Jika dalam sistem e-Warong jenis pangan yang dikonsumsi masih bisa diarahkan, maka dalam penyaluran langsung ke rekening KPM, pemanfaatan bantuan sepenuhnya tergantung pada pilihan penerima. Ini menekankan bahwa pendekatan pendistribusian yang diterapkan cenderung memindahkan posisi pemerintah dari pengendali konsumsi menjadi penyedia akses pangan.

Temuan ini didukung oleh Puspitasari et al. (2025) yang mengungkapkan bahwasanya fleksibilitas dalam sistem penyaluran bantuan menyebabkan

pengawasan terhadap penggunaan bantuan menjadi lebih terbatas. Dengan begitu, strategi pendistribusian BPNT di Kota Banda Aceh dapat dipahami sebagai pendekatan yang menciptakan keseimbangan antara efisiensi distribusi dan kebebasan penerima, tetapi dengan konsekuensi pada aspek kontrol dan pengawasan. Dalam perspektif implementasi kebijakan, kondisi ini dapat dipahami melalui sudut pandang Grindle (1980) yang menegaskan bahwa selain isi kebijakan, keberhasilan suatu kebijakan juga ditentukan oleh konteks pelaksanaannya (Pramono, 2020). Dalam penelitian ini, strategi distribusi yang telah dibuat dengan teliti tetap dipengaruhi oleh kondisi di lapangan, seperti pendamping sosial, pola komunikasi, serta tingkah laku para penerima manfaat.

Dari sisi aksesibilitas, strategi distribusi yang berbasis perbankan menunjukkan bahwa program tersebut berkontribusi dalam mengurangi hambatan yang bersifat geografis dan administratif. KPM dapat mengakses bantuan dengan lebih mudah tanpa harus terikat dengan lokasi tertentu. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan telah meningkatkan akses terhadap bantuan pangan. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Laurentcia & Yusran (2021) yang menemukan bahwasanya BPNT berperan dalam memperluas akses pangan bagi rumah tangga yang hidup dalam kemiskinan. Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya efisien karena ada batasan dalam menyampaikan informasi kepada KPM. Beberapa penerima tidak mendapatkan informasi tentang penyaluran secara langsung, sehingga mereka terpaksa mencari informasi secara mandiri. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun akses fisik sudah meningkat, mendapatkan informasi tetap menjadi tantangan dalam pelaksanaan program.

Strategi distribusi yang diterapkan tidak mengalami masalah yang berarti pada ketersediaan pangan, karena kondisi ketersediaan pangan di Kota Banda Aceh relatif stabil. Hal ini menunjukkan bahwa strategi distribusi berlangsung dalam lingkungan yang mendukung, sehingga penerima memiliki banyak pilihan dalam memenuhi pangan mereka. Menurut UU Pangan No. 7 Tahun 1996 dan PP No. 68 Tahun 2002, ketahanan pangan mencakup ketersediaan, akses, stabilitas dan pemanfaatan pangan (Prihatin et al., 2012). Dalam penelitian ini, strategi distribusi BPNT menunjukkan adanya perluasan akses terhadap pangan, namun belum

sepenuhnya menjamin kualitas dan pemanfaatan pangan secara optimal. Dalam aspek pemanfaatan, strategi pendistribusian BPNT yang berbentuk penyaluran langsung melalui transfer ke rekening KPM memberikan kesempatan bagi KPM untuk mengelola bantuan sesuai kebutuhan mereka. Bantuan tersebut terutama dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan pangan dasar, seperti beras dan bahan pokok lainnya, serta membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan telah berperan dalam mendukung pemenuhan konsumsi pangan.

Pada aspek tepat jumlah, nominal bantuan telah ditetapkan sesuai ketentuan, namun jumlah tersebut dinilai belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga penerima. BPNT lebih berfungsi sebagai dukungan tambahan untuk konsumsi pangan ketimbang sebagai sumber utama. Hasil ini didukung oleh penelitian Laurentcia & Yusran (2021) yang mengungkapkan bahwasanya bantuan sosial untuk pangan masih belum mencukupi kebutuhan rumah tangga yang hidup dalam kemiskinan. Di samping itu, kurangnya pengawasan dalam pemanfaatan bantuan menunjukkan bahwa keberhasilan dalam strategi distribusi bergantung pada perilaku penerima. Dalam konteks ini, bagaimana rumah tangga memilih untuk memanfaatkan bantuan menjadi elemen kunci yang menentukan apakah tujuan program dapat tercapai. Ini semakin menegaskan pendapat Grindle (1980) dalam (Pramono, 2020) bahwa konteks dalam pelaksanaan, termasuk perilaku para pelaku, memberikan dampak signifikan terhadap hasil kebijakan.

Selanjutnya, kendala yang ditemukan seperti ketidakstabilan dalam penyaluran bantuan dan batasan dalam komunikasi menunjukkan bahwa strategi distribusi yang digunakan masih menghadapi sejumlah kesulitan dalam implementasinya. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Puspitasari et al. (2025) yang menemukan adanya masalah dalam aspek teknis distribusi serta minimnya sosialisasi kepada para penerima manfaat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa strategi distribusi BPNT untuk memenuhi kebutuhan pangan di Kota Banda Aceh menekankan peningkatan aksesibilitas dan fleksibilitas melalui sistem penyaluran langsung melalui transfer ke rekening KPM yang dapat

mempermudah proses distribusi dan memberikan kebebasan kepada penerima dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Namun, strategi ini masih menghadapi berbagai tantangan terkait pengawasan, komunikasi, serta keterbatasan jumlah bantuan, sehingga efektivitasnya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan belum sepenuhnya maksimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Mengacu pada hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwasanya strategi pendistribusian BPNT dalam pemenuhan konsumsi pangan di Kota Banda Aceh dilaksanakan melalui mekanisme penyaluran langsung ke rekening KPM dalam bentuk transfer uang. Strategi ini merupakan peralihan dari sistem e-Warong menjadi sistem yang lebih adaptif, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam distribusi dan mempermudah akses penerima terhadap bantuan yang telah diberikan. Strategi distribusi ini terbukti meningkatkan akses KPM terhadap bantuan pangan karena penerima dapat memperoleh bantuan secara mandiri tanpa bergantung pada lokasi tertentu. Di samping itu, sistem penyaluran langsung melalui transfer ke rekening KPM memungkinkan KPM untuk memilih jenis pangan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing, sehingga secara keseluruhan berkontribusi dalam menunjang pemenuhan konsumsi pangan keluarga.

Namun, strategi ini juga memiliki keterbatasan. Fleksibilitas dalam pemanfaatan bantuan menyebabkan pengawasan langsung terhadap penggunaan bantuan menjadi lebih terbatas. Di samping itu, batasan jumlah bantuan membuat BPNT belum mampu memenuhi kebutuhan pangan secara menyeluruh dan hanya berfungsi sebagai tambahan bantuan, serta kurangnya optimalisasi dalam penyampaian informasi kepada penerima manfaat.

Oleh karena itu, strategi distribusi BPNT di Kota Banda Aceh dapat dikatakan berperan dalam meningkatkan akses dan membantu pemenuhan konsumsi pangan, tetapi efektivitasnya masih terpengaruh oleh berbagai faktor, terutama dalam hal pengawasan, komunikasi, serta batasan jumlah bantuan. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan pemerintah yang harus mempertimbangkan penyesuaian

jumlah bantuan agar lebih sesuai dengan kondisi harga pangan yang terus meningkat. Dalam jangka panjang, BPNT juga harus dihubungkan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat agar tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sementara, tetapi juga dapat mendorong kemandirian dan kesejahteraan para penerima manfaat secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan masukan selama proses penelitian hingga penyusunan artikel ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR REFERENSI

- Amolegbe, K. B., Upton, J., Bageant, E., & Blom, S. (2021). Food price volatility and household food security: Evidence from Nigeria. *Food Policy*, 102, 102061. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2021.102061>
- Sunty, D. A., Alvionita, N., Sinaga, C. A. P., & Aritonang, T. V. P. (2025). Dampak Penerapan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(5), 397–412. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.339>
- Dula, T., Yasin, J., Jember, M., Kebede, D., Belay, S., Adamu, Y., & Tolossa, D. (2024). Analyzing food security and livelihoods of poor households in Gelan sheger city, Ethiopia: a sustainable livelihood framework approach using food consumption score. *Cogent Food & Agriculture*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311932.2024.2421599>
- Ernawati, M., Sugianor, & Arpandi. (2026). *Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Program Sembako Di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Ambakiang Dan Desa Piyait)*. Retrieved February 2, 2026, from <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/JPP/article/view/696>

- Olabu, F., Saleh, S. E., & Dai, S. I., (2024). Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kemiskinan. *Economic Reviews Journal*, 3(4). <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i4.470>
- Harun, Moh. J., Canon, S., & Akib, F. H. Y. (2025). Pola Konsumsi Dan Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin Di Desa Sukamaju Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Economic Resources*. <https://doi.org/https://doi.org/10.57178/jer.v8i2.2079>
- Ibrahim, S. N. K., Hidayati, F., Umaternate, R., & Taufiqurrokhman. (2024). Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan Program Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah 2024. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 18.
- Jakaria, Chaniago, N., & Bully, G. S. (2024). Dapatkah Ketahanan Pangan Menurunkan Tingkat Kemiskinan Antar Provinsi Di Indonesia? *Media Ekonomi*, 32, 1–18. <https://doi.org/10.25105/me.v32i2.22698>
- Laurentcia, S., & Yusran, R. (2021). Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Nanggalo Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 4(1), 7–17. <https://doi.org/10.24036/jce.v4i1.433>
- Mulyasari, G., Windirah, N., Humanika, E., & Agusti, N. (2024). Studi Komparasi Ketahanan Pangan Di Kota Surabaya Dan Bengkulu. *Jurnal Agribisnis*, 13(1), 9–18. <https://doi.org/10.32520/agribisnis.v13i1.3016>
- Munthe, G. U. S., & Manggalou, S. (2025). Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt): Studi Evaluasi Di Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. *Journal Publicuho*, 8(4), 2516–2523. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i4.984>
- Mustofa, M., Sugiyanto, C., & Susanto, A. A. (2023). Analysis of the Impact of the Raskin Program on Food Security for Poor Households in Indonesia. *Jurnal Economia*, 19(1), 127–140. <https://doi.org/10.21831/economia.v19i1.58937>

- Oktaia, H. J., Mulyani, W. P., & Pitoyo, A. J. (2025). Determinan Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Indonesia: Suatu Pendekatan Multilevel. *Jurnal Pangan*, 34(2), 151–168. <https://doi.org/10.33964/jp.v34i2.879>
- Pertiwi, R. A., Qonita, R. R. A., & Sutrisno, J. (2019). The Effectiveness of Rice for the Prosperous Population Program and Non-Cash Food Assistance (Case Study in Sikayu Village, Buayan Sub-district, Kebumen District). *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture*, 34(2), 140. <https://doi.org/10.20961/carakatani.v34i2.27346>
- Pramono, J. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (M. P. Dr. Sutoyo, Ed.). UNISRI Press.
- Prihatin, S. D., Samsi, S., & Mudiyono, H. (2012). Ancaman Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani. In *Jurnal Ilmiah CIVIS: II* (Number 2).
- Puspitasari, I., Retno, P. D., Auliazaki A, S., & Valonika A, T. N. (2025). Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.56672/syirkah.v4i1.436>
- Rahman, A., Rahman, A. S., & Nuralim. (2024). Pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai (Bnpt) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ulugalung Bantaeng. *Astina Mandiri*. <https://doi.org/10.55903/juria.v3i2.225>
- Rahman, H., Khumayah, S., & Nursahidin, N. (2024). Pengaruh Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Efektivitas Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(12), 1997–2008. <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i12.6585>
- Ridha, M. R., & Rumayya, R. (2024). Analisis Dampak Program Bantuan Pangan Non-Tunai Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Pertanian di Maluku. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 24(1), 17–30. <https://doi.org/10.21002/jepi.2024.02>